

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. *GO-JEK* INDONESIA  
DENGAN MITRA PENGENDARA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fath Andrean**

**NIM. C72214076**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Surabaya**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Fath Andrean  
NIM : C72214076  
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif  
terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-  
JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2018

Saya yang menyatakan



Fath Andrean

NIM. C72214076

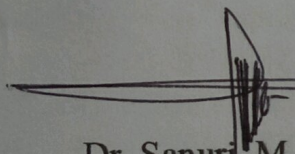


## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fath Andrean NIM.C72214076 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

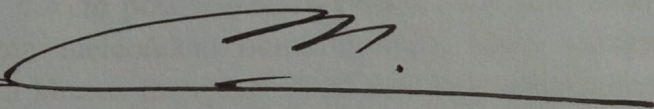
### Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



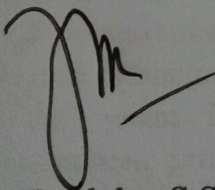
Dr. Sanuri, M.Fil.I.  
NIP. 197601212007101001

Penguji II



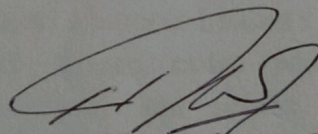
Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.  
NIP. 195511181981031003

Penguji III



Dr. Priyo Handoko, S.S., S.H., M.Hum.  
NIP. 196602122007011049

Penguji IV



Holilur Rohman, M.H.I.  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 15 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.  
NIP. 196803091996031002

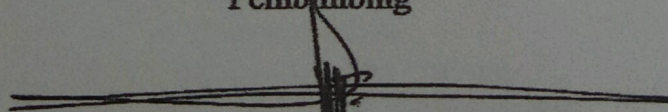


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fath Andrean NIM:C72214076 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Januari 2018

Pembimbing



Dr. Sanuri M.Fil.I.

NIP : 197601212007101001





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FATH ANDREAN  
NIM : C72214076  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : fath.and.re.and@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERJANJIAN  
KEMITRAAN ANTARA PT.GO-JEK INDONESIA DENGAN MITRA PENGENDARA**

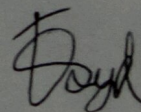
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Februari 2018

Penulis



(Fath Andrean)





## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II      KONSEP PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN</b>	
<b>              HUKUM POSITIF.....</b>	<b>20</b>
A. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	20
1. Pengertian Akad.....	20
2. Rukun dan Syarat Akad .....	23
3. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam.....	25

4. Macam-Macam Akad.....	31
5. Akhir Akad.....	33
B. Shirkah .....	34
1. Pengertian <i>Shirkah</i> .....	34
2. Dasar Hukum <i>Shirkah</i> .....	34
3. Macam-Macam <i>Shirkah</i> .....	35
4. Sebab-Sebab yang Membatalkan <i>Shirkah</i> .....	37
C. Perjanjian Menurut Hukum Positif.....	38
1. Peristilahan dan Makna Kontrak atau Perjanjian .....	38
2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian .....	40
3. Asas Perjanjian.....	42
4. Unsur Perjanjian.....	47
5. Pelaksanaan kewajiban Kontraktual.....	49
6. Ingkar Janji ( <i>Wanprestasi</i> ).....	50
7. Pernyataan Lalai ( <i>Ingebreke Stelling</i> ) .....	50
8. Ganti Rugi ( <i>Schadevergoeding</i> ).....	51
9. Kebatalan atau Pembatalan Kontrak .....	52
D. Perjanjian Kemitraan .....	60
1. Definisi.....	60
2. Pola Kemitraan .....	61
E. Perjanjian Berbentuk Transaksi Elektronik.....	62
BAB III PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. <i>GO-JEK</i> INDONESIA DENGAN MITRA PENGENDARA.....	64
A. Gambaran Umum PT. <i>GO-JEK</i> Indonesia.....	64
1. Sejarah PT. <i>GO-JEK</i> Indonesia .....	64
B. Visi dan Misi.....	65
C. Layanan.....	66





## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Hubungan antar sesama Manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad). Manusia tidak akan pernah lepas dari perjanjian (akad) dalam kehidupannya. Dalam kegiatan perekonomian umat, lahirnya jual beli pasti dimulai dengan akad, demikian pula terjadinya sewa-menyewa didahului oleh akad. Hal demikian menggambarkan bahwa akad sangat penting dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam perjanjian.<sup>2</sup>

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi.

<sup>1</sup> Ramli Semmawi, “Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Syir’ah*, No.2, Vol.8 (Desember 2010), 1.

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2012), 1.



Dalam dunia usaha, penggunaan klausul baku ini juga digunakan sebagai dasar hubungan hukum antara PT. *GO-JEK* Indonesia<sup>4</sup> dengan mitra kerjanya. Perjanjian kemitraan yang diterapkan PT. *GO-JEK*. Indonesia dengan mitra pengendara dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik. Kontrak elektronik tersebut terletak di ponsel mitra pengendara yang digunakan untuk meng-*install* aplikasi *GO-JEK* dan bisa diakses kapanpun selama ponsel tersebut terhubung dengan Internet.

<sup>4</sup> GO-JEK merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online yang menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi, pesan antar makanan, dan berbagai layanan lainnya. Masyarakat dapat memesan layanan GO-JEK melalui aplikasi yang bersifat online. Aplikasi GO-JEK bisa di dapat dari sistem operasional telepon seluler android dan dapat diakses via <http://GO-JEK.com/app>.

4 GO-JEK merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi online yang menyediakan berbagai macam layanan termasuk transportasi, pesan antar makanan, dan berbagai layanan lainnya. Masyarakat dapat memesan layanan GO-JEK melalui aplikasi yang bersifat online. Aplikasi GO-JEK bisa di dapat dari sistem operasional telepon seluler android dan dapat diakses via <http://GO-JEK.com/app>.

Dalam *Q.S. al-Nisā'*: 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang *bātil*.<sup>5</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ..."

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (Q.S. *al-Nisā'*: 29).

Beberapa contoh klausul perjanjian yang diambil sebagai bahan kajian perihal hubungan kerja sama adalah<sup>6</sup>

AKAB, sebagai pemilik dari aplikasi *GO-JEK*, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan persyaratan tersebut di lokasi ini yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi *GO-JEK* maupun kelanjutan kerjasama mitra setelah tanggal

<sup>5</sup> Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), 36.

<sup>6</sup> Pasal 2 Perjanjian Kemitraan PT.GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara.



pengumuman atas perubahan persyaratan akan diartikan bahwa mitra setuju untuk terikat oleh persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.

Selain itu dalam ketentuan kontrak elektronik perihal pembayaran oleh konsumen yang juga perlu dikaji yaitu,<sup>7</sup>

Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:

Mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi GO-JEK, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan prosentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi *GO-JEK* ataupun melalui media lainnya).

Dari sebagian contoh ketentuan di dalam kontrak elektronik yang penulis kemukakan, terlihat ketidakseimbangan dalam isi perjanjian kontrak tersebut menurut mitra pengendara. Dalam ketentuan kontrak, pihak pengelola tidak secara tegas dan transparan menuliskan skema bagi hasil yang diterapkan. Selain itu, pihak mitra pengendara dituntut untuk harus setuju terhadap segala perubahan isi perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola *GO-JEK* tanpa ada ruang sedikitpun dari pihak mitra untuk melakukan sanggahan dan negosiasi. Hal ini yang nantinya berpotensi akan menimbulkan permasalahan hukum.

Pada praktiknya perubahan kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya demonstrasi di beberapa Kota yang dilakukan oleh Mitra pengendara. Salah satunya terjadi pada tanggal 3 Oktober 2016 di kantor pusat *GO-JEK* yang berada di Kemang. Dalam selebaran pernyataan Mitra pengendara kepada PT.*GO-JEK* Indonesia para pengendara *GO-JEK* memberikan Tujuh poin penting sebagai tuntutan mereka. Pertama, menuntut dan meminta PT *GO-JEK* Indonesia

<sup>7</sup> Pasal 3.3 dalam Perjanjian Kemitraan PT. *GO-JEK* Indonesia dengan Mitra Pengendara.

Selain itu beberapa permasalahan yang sering kali dikeluhkan oleh para mitra pengendara yaitu terkait kebijakan *auto suspend* dan putus mitra secara sepihak. Pihak *GO-JEK* bebas untuk melakukan *suspend* (menutup akses kepada akun) jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. *GO-JEK* juga memiliki kewenangan untuk memutus hubungan perjanjian kemitraan secara sepihak jika terjadi indikasi kecurangan atau

<sup>10</sup><http://surabaya.tribunnews.com/2016/08/18/inilah-7-tuntutan-pengendara-GO-JEK-yang-demo-di-dprd-surabaya>, diakses 19 september 2017.





unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), bunga (*riba*) dan kebatilan atau kedzaliman. Dengan demikian melalui hukum perjanjian yang berdasarkan prinsip syariah, diharapkan dapat lebih mendatangkan kemanfaatan bagi para pihak dan terbebas dari unsur kedzaliman.

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka masalah-masalah yang muncul yang bisa dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perjanjian kemitraan antara PT.*GO-JEK* Indonesia dengan Mitra pengendara.
2. Hubungan hukum dan kedudukan para pihak dalam Perjanjian kemitraan.
3. Penerapan perjanjian kemitraan antara PT. *GO-JEK* Indonesia dengan Mitra Pengendara.
4. Keabsahan perjanjian kemitraan tersebut dalam pandangan Hukum Islam.
5. Kesesuaian perjanjian kemitraan tersebut dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Akibat dari perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT.*GO-JEK* Indonesia dengan Mitra Pengendara.
7. Cara penyelesaian sengketa kontrak jika terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak.

Dari Beberapa masalah yang sudah diidentifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada tiga masalah saja, yaitu :



- ### C. Rumusan Masalah

- ## D. Kajian Pustaka

Petama, Tinjauan asas-asas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi *Syariah* (KHES) terhadap perubahan perjanjian kemitraan antara PT. *GO-JEK* Indonesia -

Kedua, Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan *Gadget* oleh Pekerja di perusahaan *GO-JEK* Surabaya. Skripsi tersebut ditulis oleh Horidatul Bahiyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, praktik kontrak cicilan *Gadget* Oleh Pekerja Di Perusahaan *GO-JEK* Surabaya tidak sesuai dengan kontraknya. Jika Ditinjau dengan hukum Islam, jual beli dengan sistim kredit itu sah, dalam praktik jual belinya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam, dan dalam hukum perdata Istilah cicil yang dikenal dalam masyarakat tidak selamanya harus diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksud adalah sewa beli.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Horidatul Bahiyah, “Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan *Gadget* oleh Pekerja di perusahaan *GO-JEK* Surabaya” (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016), 81.



Keempat, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi *Online GO-JEK* Berdasarkan *Contract Drafting* Dengan Akad Mushārah yang Diterapkan Oleh PT *GO-JEK* Indonesia Cabang Tidar Surabaya. Skripsi yang ditulis oleh Niamatus Sholikhah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Praktik jasa transportasi *online GO-JEK* berdasarkan *contract drafting* oleh PT. *GO-JEK* Indonesia cabang Tidar Surabaya yaitu melalui aplikasi *GO-JEK* yang sudah di *install* dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar dan terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Niamatus Sholikha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi *Online GO-JEK* Berdasarkan *Contract Drafting* Dengan Akad Mushārah Yang Diterapkan Oleh PT *GO-JEK* Indonesia Cabang Tidar Surabaya” Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).











b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data, yakni dari pustaka, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.<sup>17</sup>

- 1) Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*
- 2) Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum.*
- 3) Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*
- 4) Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online.*
- 5) Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*
- 6) Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam.*
- 7) Wiwoho, *Keadilan Berkontrak.*
- 8) Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah.*
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 4. Teknik pengumpulan data

a. *Interview* (wawancara)

Menurut Kartono, *interview* atau wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.



informasi-informasi atau keterangan.<sup>18</sup> Pihak Pertama berfungsi sebagai penanya, disebut *Interviewer* yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber pada penelitian ini yaitu pihak Management PT. *GO-JEK* Indonesia dan Mitra pengendara PT. *GO-JEK* Indonesia di Surabaya. Dengan metode ini diharapkan peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat dijadikan data.

b. Observasi atau pengamatan

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>19</sup> Dengan observasi ini, peneliti ingin melihat, mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian atau fenomena dan budaya yang terjadi sebagaimana sebenarnya yang terjadi di PT. *GO-JEK* Indonesia Cabang Surabaya. Dalam hal ini penulis mengamati dan melakukan praktik secara langsung menjadi Mitra Pengendara PT. *GO-JEK* Indonesia.

### c. Studi pustaka

Adalah pengumpulan data dengan menggali bahan pustaka dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Adapun bahan

<sup>18</sup> Ibid., 83.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut :

- ## 6. Teknik analisis data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dalam menjabarkan data-data tentang perjanjian kemitraan dalam bentuk kontrak elektronik antara PT. *GO-JEK* Indonesia di Surabaya dengan mitra pengendara.

Untuk tinjauan hukum Islam dan hukum positif-nya menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni dengan melihat fakta-fakta umum dengan meletakkan norma hukum Islam dan hukum positif sebagai acuan dalam menilai fakta-fakta khusus yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

[illegible]

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Setiap bab menimbulkan suatu hubungan antara bab pertama dengan bab selanjutnya, sehingga merupakan suatu kesatuan yang saling menopang. Tiap-tiap bab dibagi ke dalam sub-sub yang rinciannya sebagai berikut:

Bab Pertama, memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi konsep perjanjian dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi Pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, subjek dan objek perjanjian, syarat sah serta kekuatan berlakunya perjanjian, akibat hukum dari suatu perjanjian, perjanjian kemitraan, dan perjanjian berbentuk transaksi elektronik.

Bab ketiga, berisi Perjanjian kemitraan antara PT. *GO-JEK* Indonesia dengan Mitra pengendara. Beberapa hal yang dibahas antara lain gambaran umum tentang PT. *GO-JEK* Indonesia, hubungan hukum dan kedudukan para pihak, proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak, proses penyelesaian jika terjadi sengketa, penerapan perjanjian kemitraan antara PT.*GO-JEK* Indonesia dengan mitra pengendara.







Menurut terminologi ulama *fiqh*, akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu:

Artinya: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai.”

Dari definisi yang dikemukakan oleh *fuqahā* Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ini dapat dipahami bahwa akad itu bisa mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *taṣarruf syar'i* secara mutlak, baik *iltizam* tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.<sup>24</sup>

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh *fuqahā* Hanafiah, yaitu:

Artinya : “Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.”<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 44.



Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang meknannya saling berkaitan, yaitu kata akad, *iltizam*, dan *taṣarruf*. Yang dimaksud dengan *iltizam* adalah setiap *taṣarruf* (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, atau menghentikannya, baik *taṣarruf* tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan pembebasan utang, meupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dan ijarah. Dalam konteks ini, *iltizam* sama dengan akad dalam pengertian yang umum yang telah dikemukakan di atas, tetapi berbeda dengan pengertian khusus. Akad dalam pengertian khusus merupakan bagian dari *iltizam* yang timbul dari dua pihak, seperti jual beli dan gadai. Dengan demikian, *iltizam* lebih umum daripada akad dalam arti khusus, karena *iltizam* mencakup *taṣarruf* dari satu pihak dan dua pihak. Sedangkan pengertian *taṣarruf* adalah setiap sesuatu yang timbul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, yang oleh *syara'* dipandang menimbulkan akibat-akibat hukum, baik untuk kepentingan orang tersebut atau bukan. *Taṣarruf* yang timbul berupa ucapan seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf. Sedangkan *taṣarruf* yang timbul dari



Adapun syarat menurut pengertian Istilah *fuqaha* dan *ushuliyyun* adalah segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal (*kharijiyy*). Maksudnya adalah tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad.<sup>28</sup>

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, 97-98.





Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

b. Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Menurut Faturrahman Djamil, Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun.













- Suatu akad dinamakan akad batal apabila terjadi pada orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat kecakapan atau objeknya tidak dapat menerima hukum akad hingga dengan demikian pada akad itu terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang *syara'*. Akad batal dipandang tidak pernah terjadi menurut hukum, meskipun secara material pernah terjadi, yang oleh karenanya tidak mempunyai akibat hukum sama sekali.<sup>39</sup>

Menurut *fuqaha* mazhab Hanafi, pembagian akad tidak sah menjadi akad batal dan rusak itu tidak berlaku untuk segala macam akad, tetapi hanya dalam akad untuk memindahkan hak milik / akad kebendaan yang mengakibatkan

<sup>39</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 114



kewajiban timbal balik antara pihak-pihak yang berakad. Adapaun akad bukan kebendaan, seperti perwakilan, perwalian dan sebagainya, demikian pula akad kebendaan yang tidak menimbulkan kewajiban timbal balik, seperti pinjam meminjam, titipan dan sebagainya; demikian pula tindakan-tindakan sepihak seperti wakaf, pengakuan dan sebagainya, tidak dibedakan antara yang batal dan yang rusak.<sup>40</sup>

## 1. Pengertian *Shirkah*

## 2. Dasar Hukum *Shirkah*

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Dalam ayat ini ditafsirkan ulama' maksud *khulato*' adalah orang-orang yang bersekutu. Orang-orang yang bersekutu itu membohongi bagian yang lain ke

<sup>42</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musharakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 19.

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Di samping ayat-ayat diatas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis qudsi yang membolehkan akad *Shirkah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا مِ بَيْنَ أَحَدُهُمَا صَاحِبُهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia merafa’kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud).<sup>44</sup>

*Shirkah* pertama-tama dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *Shirkah milk* dan *Shirkah ‘Uqud*.

<sup>44</sup> Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), 256.





- hasil atau keuntungan.
- rujūh*, yakni *shirkah* antara dua orang atau lebih yang me  
dan tingkat professional yang baik mengenai s  
bisnis, dimana mereka membeli barang dengan kredit  
a secara tunai dengan jaminan reputasi mereka.
- ṣamā*, yaitu *shirkah* antara dua orang atau lebih yang seprofesi  
pekerjaan bersama-sama dan membagi untung be  
n kesepakatan dalam perjanjian.<sup>47</sup>





mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>52</sup> Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

## 2. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidaknya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan *instrument* hukum yang *terkonkritisasi* dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam buku III KUH Perdata, yaitu:

- (a) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;
- (b) Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>53</sup>

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat-syarat sah yang termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata :

<sup>52</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online...*, 52.

<sup>53</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), 110.



1) Kesepakatan atau persetujuan Para Pihak;

Sepakat yang dimaksudkan bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2) Kecakapan Para Pihak dalam membuat suatu perjanjian;

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut pasal 1330 KUH Perdata jo. 330 KUH Perdata yang dimaksud cakap menurut hukum adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin.

3) Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu. Mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu untuk disebutkan.<sup>54</sup>

4) Suatu sebab yang halal;

Terkait dengan pengertian sebab yang halal beberapa sarjana mengajukan pemikirannya, antara lain H.F.A. Vollmar dan Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan pengertian sebab (kausa) sebagai maksud

<sup>54</sup> Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2013), 26.







Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan.

Dalam hukum kontrak, itikad baik memiliki tiga fungsi yaitu, fungsi standart, fungsi menambah, dan fungsi membatasi. Fungsi standart berarti semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Fungsi menambah berarti Hakim dapat menambah isi perjanjian dan menambah kata-kata peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian itu. Fungsi membatasi dan meniadakan berarti hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian jika terjadi perubahan keadaan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan...", 92.





- Asas Proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut.<sup>65</sup>

Terkait isi kontrak, kepastakaan hukum kontrak membaginya dalam beberapa unsur yaitu:

- <sup>65</sup> Ibid., 89.





- a. Memberikan sesuatu, perikatan dengan prestasi untuk memberikan sesuatu apabila prestasi tersebut berwujud menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda (Contoh: Kontrak jual beli; Kontrak sewa menyewa).
- b. Berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda (Contoh: Kontrak pemborongan; Kontrak jasa konstruksi), atau
- c. Tidak berbuat sesuatu, setiap prestasi untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu (Contoh: dalam klausul kontrak distribusi ada syarat bagi pihak distributor untuk tidak memasarkan produk “X” di wilayah Jawa Timur).<sup>69</sup>

## 6. Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wujud dari tidak memenuhi perikatan ada tiga macam, yaitu

- Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,
- Debitur terlambat memenuhi perikatan
- Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.<sup>70</sup>

## 7. Pernyataan Lalai (*Ingebreke Stelling*)

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Pernyataan lalai merupakan upaya hukum untuk sampai kepada

<sup>69</sup> Ibid., 244.

<sup>70</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan...*, 18-19.



“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Ganti Rugi (*Schadevergoeding*)

Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi ialah biaya, rugi dan bunga.

a. Pengertian Rugi (*schade*)

Apabila undang-undang menyebutkan rugi maka yang dimaksudkan sebagai berikut kerugian nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul karena ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan

ganti rugi ialah biaya, rugi dan

#### a. Pengertian Rugi (*schade*)

b. Hubungan sebab akibat (*kausal*)

<sup>71</sup> Ibid.

## 9. Kebatalan atau Pembatalan Kontrak

Suatu kontrak yang dibatalkan berakibat hukum perikatan yang timbul dari kontrak itu dikembalikan pada keadaan semula sebagaimana ditentukan dalam pasal 1451 KUH Perdata. Selanjutnya, pihak yang menuntut pembatalan kontrak tersebut, menurut ketentuan Pasal 1452 KUH Perdata, dapat pula menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga jika ada alasan yang sah untuk itu. Jadi, makna pembatalan kontrak lebih mengarah kepada proses hukum pembuatan kontrak.<sup>73</sup>

Kontrak yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali, dalam arti dibatalkan secara sepihak, melainkan harus memperoleh pihak lainnya, sehingga harus diperjanjikan lagi. Namun demikian, untuk kontrak-kontrak tertentu dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak jika ada alasan-alasan yang diberikan oleh undang-undang, antara lain:

- 1) Kontrak yang bersifat terus-menerus, menurut Pasal 1571 KUH Perdata, dapat dihentikan secara sepihak, misalnya kontrak sewa-menyewa yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan memberitahukan kepada penyewa;
- 2) Kontrak sewa-menyewa rumah setelah berakhir waktu sewa seperti yang ditentukan dalam kontrak, penyewa tetap menguasai rumah tersebut tanpa ada teguran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa-menyewa dengan syarat-syarat yang sama waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa-menyewa tersebut, menurut Pasal 1587 KUH Perdata, ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat;
- 3) Kontrak pemberian kuasa, menurut Pasal 1814 KUH Perdata, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

- 1) Secara aktif, dalam arti mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan negeri;
- 2) Secara pasif, dalam arti menunggu pihak lawan dalam kontrak mengajukan gugatan pembatalan di pengadilan negeri dan di pengadilan negeri yang sama memberikan jawaban atau melakukan gugatan balik (gugatan rekonsensi) dengan menunjukkan kelemahan atau kekurangan dalam kontrak agar kontrak dibatalkan oleh pengadilan negeri.

ra pasif, yaitu memberikan jawaban atas gugatan gugatan balik ke pengadilan negeri, KUH Perdata ya. Sebaliknya, untuk proses hukum secara aktif, mbatalan ke pengadilan negeri, KUH Perdata telah asal 1454 yang memberikan batas waktu 5 tahun.<sup>74</sup>

[illegible]

Kontrak yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya para pihak harus mentaati kontrak tersebut sama dengan undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar kontrak, maka dia dianggap sama dengan melanggar undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu, yakni sanksi hukum. Jadi, siapapun yang melanggar kontrak, dia akan mendapat hukuman seperti yang telah diterapkan dalam undang-undang. Kontrak mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, dalam perkara perdata hukuman bagi pelanggar kontrak ditetapkan oleh Hakim berdasarkan undang-undang atas permintaan pihak lainnya, menurut undang-undang, pihak yang melanggar kontrak itu diharuskan membayar ganti kerugian (vide Pasal 1243 KUH Perdata), kontraknya dapat diputuskan (outbinding, vide Pasal 1266 KUH Perdata), menanggung beban resiko (vide Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di pengadilan. (vide Pasal 181 ayat (1) HIR).

Jika Syarat Objektif tidak dipenuhi, maka kontrak itu batal demi hukum, artinya kontrak itu sejak semula dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada perikatan yang ditimbulkan. Karena sejak semula dianggap tidak pernah ada kontrak, maka logika hukumnya tidak akan ada kontrak yang diakhiri atau dihapuskan.

Suatu kontrak dibatalkan karena syarat subjektif dan syarat objektif dalam kontrak tidak dipenuhi atau karena dibatalkan satu pihak karena wanprestasi menimbulkan akibat-akibat hukum, sebagai berikut:



- Akibat hukum lebih lanjut dari efek atau daya kerja pembatalan, jika setelah pembatalan satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang lain dapat mengajukan gugatan revindikasi berdasarkan Pasal 574 KUH Perdata untuk pengembalian benda/barang miliknya, atau gugatan perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang berdasarkan Pasal 1359 KUH Perdata.

Menurut Herlien Budiono, pembatalan sebagian dapat terjadi karena satu diantara beberapa klausula dalam kontrak tidak sah, tanpa mengganggu kontrak secara keseluruhan, dengan alasan terbuka kemungkinan para pihak masih menginginkan agar kontrak tetap dilaksanakan dengan menyampingkan klausula yang tidak sah tersebut. Pembatalan sebagian hanya tepat untuk pembatalan atas bagian kontrak atau klausula kontrak yang tidak bersifat *vital* atau *esensial*.

<sup>76</sup> Ibid.

c. Berlakunya Syarat Batal dan Syarat Putus terhadap Perjanjian

Menurut Pasal 1265 KUH Perdata, jika syarat putus menurut Pasal 1266 ayat (1) KUH Perdata dianggap selalu dicantumkan dalam kontrak timbal balik. Jika

[illegible]

Penyampingan Pasal 1266 yang lazim dinyatakan oleh para pihak dalam kontrak tidak dibenarkan menurut hukum, karena Pasal 1266 KUH Perdata adalah norma hukum yang bersifat memaksa.<sup>78</sup>

- (1) Harus ada kontrak timbal balik;
- (2) Harus ada wanprestasi, untuk itu sebelum satu pihak (yang berhak atas prestasi) menuntut pemutusan kontrak, pihak lainnya (yang wajib melaksanakan prestasi) harus dinyatakan lalai;
- (3) Harus berdasarkan pada putusan hakim, sesuai dengan rumusan: “...pemutusan harus dimintakan kepada pengadilan..”. Kata “harus” dalam Pasal 1266 KUH Perdata ditafsirkan sebagai norma hukum yang bersifat memaksa dan karenanya tidak boleh disampingi oleh para pihak melalui (klausula) kontrak mereka. Putusan hakim dalam hal ini bersifat *konstitutif*, artinya putusan kontrak itu diakibatkan oleh putusan hakim, bukan bersifat deklaratif (kontrak putus karena adanya wanprestasi).

<sup>78</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak...*, 438-440.

- (a) Alasan historis (sejarah), bahwa menurut Pasal 1266 KUH Perdata, putusnya kontrak terjadi karena putusan hakim;
- (b) Pasal 1266 ayat (2) KUH Perdata, menyatakan dengan tegas bahwa wanprestasi tidak demi hukum memutuskan kontrak;
- (c) Hakim berwenang memberikan tenggang waktu bagi pihak yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi untuk memenuhi prestasi kepada pihak lainnya yang berhak untuk menerima prestasi), dan ini berarti bahwa kontrak belum putus;
- (d) Pihak yang berhak menerima prestasi masih mungkin untuk menuntut pemenuhan prestasi dari pihak lainnya.<sup>79</sup>

Pemutusan kontrak yang diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata tentu saja berbeda dengan pembatalan kontrak yang diatur dalam Pasal 1446 – 1456 KUH Perdata. Pemutusan kontrak adalah akibat hukum lebih lanjut dari peristiwa hukum yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kontrak yang telah sah dan mengikat secara yuridikal bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Peristiwa hukum yang terjadi dimaksud bersifat melanggar kewajiban hukum kontraktual atau melanggar prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak, sehingga mengakibatkan kegagalan kontrak yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Menurut Agus

[illegible]





Berdasarkan dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang berisi klausul-klausul tentang hak dan kewajiban tertentu, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan

Pola kemitraan telah ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ada enam pola kemitraan dalam pasal ini, yang meliputi:

- ## 5. Distribusi dan keagenan





**BAB III**

**PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. *GO-JEK* INDONESIA DENGAN**

**MITRA PENGENDARA**

**PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT.*GO-JEK* INDONESIA DENGAN  
MITRA PENGENDARA**

### A. Gambaran Umum PT. *GO-JEK* Indonesia

## 1. Sejarah PT.*GO-JEK* Indonesia

PT. *GO-JEK* Indonesia adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan *GO-JEK* bertumpu pada tiga nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim.<sup>86</sup>

*GO-JEK* tercipta berawal dari pengamatan Nadim terhadap tukang ojek yang ada di Jakarta. Dari pengamatan Nadiem, Sistem ojek yang ada pada saat itu sangat tidak efisien dikarenakan tukang ojek lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menunggu penumpang di pangkalan.

Dengan adanya *GO-JEK*, Mitra pengendara bisa lebih banyak mendapat penumpang tanpa harus mangkal di pinggir jalan, sehingga konsumen mendapatkan harga yang murah dan masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi sehingga menurunkan kepadatan kendaraan di jalan.<sup>87</sup>

Pada awalnya *GO-JEK* beroperasi menggunakan media panggilan telepon dan hanya melayani warga Jakarta saja dengan jumlah kendaraan sebanyak 20

<sup>86</sup> <https://www.Go-Jek/about/>, diakses 27 Agustus 2017.

<sup>87</sup> Nadicem Makarim, [https://www.youtube.com/watch?v=0GqoVj\\_KGsM](https://www.youtube.com/watch?v=0GqoVj_KGsM), DBS To The Point: Di Mana-mana Go-Jek, diakses 14 Oktober 2017.

Surabaya Merupakan area keempat yang menjadi kota tempat beroperasinya *GO-JEK* setelah Jakarta, Bali, dan Bandung. *GO-JEK* mulai beroperasi di Surabaya pada bulan Juni 2015 yang berkedudukan di Ruko Mangga Dua Blok B5 no.8 Jl. Jagir Wonokromo. *GO-JEK* memulai bisnisnya dengan mengerahkan 400 (empat ratus) armada yang siap melayani masyarakat Surabaya untuk keperluan transportasi, instant courier, dan shopping. Hingga saat ini jumlah mitra pengendara terus bertambah selain karena kebutuhan masyarakat yang meningkat, juga karena banyaknya driver yang ingin bermitra di dalamnya. Untuk saat ini Kantor PT.*GO-JEK* Indonesia di Surabaya berada di Jl. Monginsidi No. 14, DR. Soetomo, Tegalsari.<sup>89</sup>

a. Visi

<sup>88</sup> Mikey Moran, [https://www.youtube.com/watch?v=U\\_W53wiGz7o](https://www.youtube.com/watch?v=U_W53wiGz7o), Sarah Sechan - Mikey Moran Co-Founder Go-Jek, diakses 14/10/2017.

<sup>89</sup> Alifiyah Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. *GO-JEK* Indonesia di Surabaya” (Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya, 2017), 49.







#### D. Perjanjian Kemitraan Antara PT. *GO-JEK* Indonesia dengan Mitra Pengendara

## 1. Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan

Adapun para pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan ini terdapat di pasal 1 tentang ketentuan umum yang berbunyi:

- AKAB adalah pemilik Aplikasi *GO-JEK* yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan/atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- DAB atau PT Dompot Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik
- GO-JEK* adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB;
- Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan/atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi *GO-JEK* dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri;
- PAB atau PT Paket Anak Bangsa adalah sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos;<sup>96</sup>

Hubungan kerja yang terjadi antara PT.GO-JEK Indonesia dengan mitra pengendara adalah hubungan perjanjian kemitraan, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama:

*GO-JEK*, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, outsourcing atau keagenan diantara masing-masing *GO-JEK*, AKAB, PAB, DAB dan Mitra.

<sup>96</sup> Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi *Go-Jek Driver*





Apabila Mitra tidak setuju dengan Persyaratan ini, Mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan Aplikasi *GO-JEK*. Mitra setuju bahwa *GO-JEK* atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi *GO-JEK* oleh Mitra, atau secara umum berhenti menawarkan atau menolak akses Mitra kedalam Aplikasi *GO-JEK* atau bagian mana pun dari Aplikasi *GO-JEK*, kapan pun untuk alasan apa pun.<sup>102</sup>

*GO-JEK* bisa menambahkan suatu persyaratan-persyaratan secara sepihak, dan mitra pengendara diharuskan untuk menerima atau menyetujui persyaratan tersebut. Jika mitra pengendara tidak menerima persyaratan baru tersebut, mitra dipersilahkan untuk mengakhiri kerjasama kemitraan tersebut.

AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi *GO-JEK*, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan Persyaratan dari waktu ke waktu. Perubahan atau penambahan atas Persyaratan tersebut akan berlaku setelah AKAB mengumumkan perubahan atau penambahan Persyaratan tersebut melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain yang dipilih oleh AKAB yang dapat mencakup perubahan atau penambahan kebijakan yang sudah ada dalam Persyaratan atau syarat dan ketentuan tambahan. Mitra menyetujui bahwa akses atau penggunaan Mitra yang berkelanjutan atas Aplikasi *GO-JEK* maupun kelanjutan kerjasama Mitra setelah tanggal pengumuman atas perubahan Persyaratan akan diartikan bahwa Mitra setuju untuk terikat oleh Persyaratan, sebagaimana telah diubah atau ditambahkan.<sup>103</sup>

<sup>101</sup> Priyo Hadi Kurniawan, *Wawancara*, Surabaya 05 Desember 2017.  
<sup>102</sup> Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi *Go-Jek Driver*.  
<sup>103</sup> *Ibid.*



harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak. *GO-JEK* juga memiliki kewenangan untuk memutus hubungan perjanjian kemitraan secara sepihak jika terjadi indikasi kecurangan atau pelanggaran dengan alasan apapun tanpa harus memberikan teguran terlebih dahulu dan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu apakah mitra benar-benar melakukan pelanggaran atau tidak.

*GO-JEK* maupun *AKAB* mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi *GO-JEK* apabila *GO-JEK* atau *AKAB* menganggap, dalam diskresi *GO-JEK* atau *AKAB* sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan *GO-JEK* ataupun *AKAB*.

Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa *GO-JEK* atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh *GO-JEK* atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra atas Persyaratan atau syarat ketentuan lain yang berlaku maupun pelanggaran yang dicurigai oleh *GO-JEK* maupun AKAB telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan penghimpunan fakta terhadap kegiatan Mitra melalui Aplikasi *GO-JEK*, pemberian surat peringatan, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi *GO-JEK* baik secara permanen maupun sementara, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).<sup>104</sup>

PT.*GO-JEK* Indonesia dapat mengubah tarif dan persentase bagi hasil sewaktu-waktu secara sepihak. Dari pengalaman yang lalu, akibat perubahan tarif secara sepihak ini sampai mengakibatkan demonstrasi di berbagai Kota sebagaimana dijelaskan di dalam Bab satu.<sup>105</sup>

Mitra menyetujui bahwa AKAB dapat:  
menentukan harga yang harus dibayarkan oleh Konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Rosikin, *Wawancara*, Surabaya 01 Desember 2017.

diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi *GO-JEK* ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB); mengambil bagian dari setiap pembayaran yang diterima oleh Mitra dari Konsumen atas jasa yang disediakan oleh Mitra kepada Konsumen untuk penggunaan Aplikasi *GO-JEK*, dimana jumlah pembagian hasil adalah berdasarkan persentase tertentu atas jumlah yang diterima dari Konsumen (yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai) dan dapat diberlakukan sewaktu waktu oleh AKAB dan akan diberitahukan kepada Mitra secara tertulis (baik melalui Aplikasi *GO-JEK* ataupun melalui media lainnya yang dipilih oleh AKAB);

Bila di kemudian hari ada ketidaksepahaman atau perseteruan antara *GO-JEK* ataupun AKAB dan Mitra mengenai pembagian hasil, harga yang ditetapkan untuk dibayar oleh Konsumen, atau biaya promosi yang dapat dibebankan kepada *GO-JEK* ataupun AKAB, ditetapkan oleh *GO-JEK* ataupun AKAB pada saat masa promosi, maka Perjanjian ini berhak diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari *GO-JEK* ataupun AKAB maupun Mitra dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepihak lainnya (baik melalui Aplikasi *GO-JEK* ataupun melalui media lainnya).<sup>106</sup>

Beberapa Pasal lain yang perlu ditinjau lebih lanjut antara lain:

*GO-JEK*, AKAB maupun Mitra berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mitra dengan ini membebaskan *GO-JEK* dan AKAB dari segala macam tuntutan, gugatan, atau tindakan hukum lainnya, baik dalam sebuah gugatan perdata maupun setiap gugatan pidana yang dialami oleh Mitra, dalam bentuk apapun terkait dengan jasa yang ditawarkan, disediakan, diselenggarakan atau diselesaikan oleh Mitra melalui Aplikasi *GO-JEK*.

Jika ada ketentuan Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh atau sebagian, maka berdasarkan hukum, ketentuan atau sebagian ketentuan ini harus dianggap sebagai bagian terpisah dari Perjanjian ini, tetapi keabsahan, keberlakuan, dan penerapan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak akan terpengaruhi.

#### 4. Kebijakan

Demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, PT.*GO-JEK*

Indonesia menetapkan peraturan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh seluruh

<sup>106</sup> Ibid.





**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. *GO-JEK* INDONESIA DENGAN  
MITRA PENGENDARA**

Untuk bergabung menjadi Mitra pengendara, PT. *GO-JEK* Indonesia memberikan beberapa syarat yaitu usia minimal 17 Tahun dan PT.*GO-JEK* mensyaratkan beberapa berkas fotocopy KTP, SIM C, dan sebagainya. Setelah semua persyaratan terpenuhi, proses selanjutnya yaitu mendatangi kantor operasional PT.*GO-JEK* Indonesia untuk verifikasi berkas, training, pembuatan akun, dan pengambilan atribut.

Di dalam proses pembuatan akun, mitra pengendara diwajibkan untuk menyetujui kontrak perjanjian kemitraan yang berada di dalam aplikasi *GO-JEK Driver*. Kontrak tersebut berbentuk kontrak elektronik dan dibuat secara sepihak oleh PT.*GO-JEK* Indonesia tanpa melalui proses negosiasi dengan Mitra pengendara. Kontrak tersebut telah disiapkan dan dibuat sedemikian rupa.

Mitra pengendara dituntut untuk menyetujui semua klausul yang telah dipersiapkan jika ingin meneruskan kerjasama kemitraan tersebut. Jika ada suatu klausul yang menurut mitra pengendara kurang sesuai dengan kehendak hatinya, mitra pengendara tidak bisa melakukan negosiasi untuk merubah isi klausul kontrak tersebut. Mitra pengendara hanya diberi pilihan untuk menerima seluruh klausul atau mengakhiri kerjasama kemitraan tersebut.





Pada tahap pelaksanaan kontrak, PT. *GO-JEK* Indonesia sering kali melakukan beberapa perubahan kebijakan secara sepihak, PT. *GO-JEK* Indonesia juga beberapa kali melakukan perubahan tarif dan perubahan cara mendapatkan bonus yang pada akhirnya berakibat pada pendapatan Mitra pengendara.<sup>113</sup>

Menurut Gary Goodpaster, sebagaimana dikutip oleh Susanti Adi Nugroho, mediasi akan berfungsi dengan baik bilamana memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat:

1. Para pihak mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding;
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan;

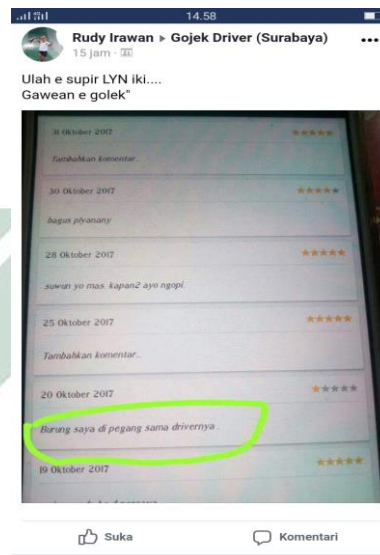
<sup>113</sup> Romli, *Wawancara*, Surabaya, 10 Desember 2017.





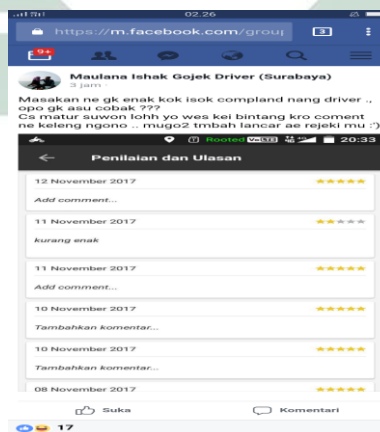
Beberapa mitra pengendara juga seringkali mendapat rating yang buruk akibat konsumen yang tidak beritikad baik.

**Gambar 4.2**  
**Penilaian Konsumen Kepada Mitra Pengendara**



Sumber: Screenshoot aplikasi Go-Jek Driver milik mitra pengendara.<sup>119</sup>

**Gambar 4.3**  
**Penilaian Konsumen Kepada Mitra Pengendara**



Sumber: Screenshoot aplikasi Go-Jek Driver milik mitra pengendara.<sup>120</sup>

<sup>119</sup> Rudy Irawan, *Wawancara*, Surabaya 05 Desember 2017.

<sup>120</sup> Maulana Ishak, *Wawancara*, Surabaya, 05 Desember 2017.

Dalam perjanjian ini *ijab* dan *qabul* terjadi saat mitra pengendara menggunakan aplikasi *GO-JEK Driver* pada saat pertama kali, karena untuk penggunaan aplikasi tersebut, Mitra pengendara diwajibkan untuk melakukan pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian dengan cara mengklik persetujuan. Jika Mitra pengendara tidak melakukan tindakan tersebut maka mitra pengendara tidak akan bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari

Akad sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya adalah kesepakatan antara dua kehendak yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Kehendak untuk mengadakan akad itu ada dua macam yaitu kehendak batin dan kehendak lahir. Kehendak batin dapat terwujud dengan adanya kerelaan (*ar-ridhā*) dan pilihan (*al-ikhtiyār*). Kehendak lahir yaitu suatu *shigat* atau yang menempati tempatnya, seperti perbuatan, yang mengungkapkan kehendak batin. Apabila kehendak batin dan lahir itu sesuai maka akad dinyatakan sah.

Dalam suatu akad terkadang hanya terdapat kehendak lahirnya saja, sedangkan kehendak batinnya tidak ada. Dalam keadaan seperti ini akad itu hanya formalnya saja, dan secara hukum dalam beberapa hal menurut *jumhur* ulama, akad semacam ini dikategorikan sebagai akad yang tidak sah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, banyak sekali Mitra pengendara yang menyatakan bahwa sebenarnya mereka tidak setuju dengan beberapa klausul/peraturan yang dibuat oleh PT.*GO-JEK* Indonesia. Akan tetapi mereka menyetujuinya karena kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka untuk menyetujui perjanjian tersebut. Mereka menyadari bahwa posisi mereka lemah dan tidak bisa merundingkan isi perjanjian tersebut yang memang dibuat sedemikian rupa.

Akibatnya, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai



tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut dengan cacat kehendak. Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

Dalam hal ini, kontrak elektronik sah dilakukan karena tidak ada larangan yang secara tegas tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, kontrak elektronik yang memuat perjanjian baku tersebut melupakan akan esensi dari prinsip *Syariah* yaitu prinsip keseimbangan. Pada praktiknya, pihak pengelola aplikasi tidak memberikan kesempatan bagi pihak mitra pengendara untuk memberikan pendapat, saran maupun komplain ketika menyusun perjanjian tersebut. Pihak pengelola membuat perjanjian tersebut secara sepihak sehingga besar kemungkinan pihak pengelola membuat isi perjanjian yang lebih menguntungkan daripada pihak mitra lainnya.

Terdapat tiga kategori akibat hukum dari perjanjian atau akad dari segi hukum Islam, yaitu akad yang sah, akad yang *fasad* dan akad yang batal. Akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash syariah* bagi mereka yang mengadakan akad. Sedangkan pada akad *fasad* dan akad batal keduanya sama-sama tidak dapat diwujudkan dan tidak memberikan akibat hukum apapun bagi para pihak yang membuat akad.

Perjanjian baku sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kontrak kemitraan antara para pihak di *GO-JEK* tersebut kurang mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat timbulnya suatu kezaliman. Hal tersebut dapat terlihat dari isi perjanjian kemitraan tersebut. PT. *GO-JEK* Indonesia bebas untuk secara sepihak menetapkan jumlah bagi hasil, serta

melakukan tindakan *suspend*, dan pemutusan hubungan perjanjian secara sepihak jika Mitra terindikasi melakukan pelanggaran kode etik, tanpa membuktikan kepada pihak manapun kalau mitra tersebut melakukan pelanggaran kode etik.

Sehingga pada praktiknya mitra pengendara bisa terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak pernah melakukan pelanggaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sistem tersebut yang berakibat merugikan para mitra. Hal tersebut bertentangan dengan firman Allah dalam *Surat al-Anfal* yang berbunyi:

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (*Q.S. al-‘Anfāl*: 58).

Dengan demikian hal tersebut bertentangan dengan rukun akad yang keempat yaitu tidak bertentangan dengan *shara*. Perjanjian baku termasuk pada perjanjian yang sah, akan tetapi perjanjian baku tersebut tidak mengandung prinsip kebebasan berkontrak dan keseimbangan (*tawāzun*). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi *fasad*. Akad yang *fasad* (dapat dibatalkan), yaitu akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, tetapi ada segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*. Oleh karena itu, perjanjian baku tidak dapat berlaku mengikat bagi para pihak.

Menghormati perjanjian menurut Islam hukumnya wajib. Hal ini karena ia memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian di samping dapat menyelesaikan persengketaan. Allah SWT memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah maupun manusia. Allah SWT berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..."

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (*Q.S. al-Ma'idah: 1*)

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini seharusnya jika Mitra pengendara menyadari bahwa peraturan yang dibuat *GO-JEK* tidak sesuai dengan kehendak hatinya, dan peraturan tersebut memang tidak bisa dirubah sesuai dengan kehendak hati mitra pengendara, maka mitra pengendara seharusnya menolak perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam praktik memang mitra pengendara menyetujui perjanjian tersebut demi mendapat pendapatan untuk kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut seharusnya mitra pengendara memang harus bersedia mengikuti persyaratan yang ada.

C. Tinjauan Hukum Positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT.*GO-JEK* Indonesia dengan Mitra Pengendara

Pelaku bisnis sering kali menyesal ketika suatu kontrak yang dibuatnya bermasalah. Padahal, persoalan hukum tersebut timbul karena ketidakhati-hatian pelaku bisnis ketika menyetujui kontrak tersebut. Umumnya, kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak bermasalah. Padahal, pemahaman isi kontrak saat

kontrak tersebut akan disetujui merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak yang disepakati tersebut bermasalah. Terkait dengan seringkali terjadinya kontrak-kontrak bermasalah, maka penting dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas bisnis adalah perbuatan hukum dalam ranah hukum bisnis, khususnya hukum kontrak.

Kontrak akan melindungi proses dan hubungan hukum bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, jika kontrak dimaksud dibuat secara sah, karena kesahan suatu kontrak merupakan penentu kelanjutan proses dan hubungan hukum bisnis mereka. Oleh karena itu, pemahaman hukum tentang perancangan, penafsiran, pelaksanaan dan penyelesaian sengketa hukum kontrak sangat penting bagi para pelaku bisnis, terlebih lagi saat ini telah berkembang aturan hukum dan praktik hukum kontrak elektronik, baik secara nasional maupun internasional.

Keabsahan kontrak elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara prinsipil, kontrak elektronik sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya hanya di media saja, kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya dibuat tertulis diatas kertas. Oleh karena itu, pembuatan dan pelaksanaan kontrak elektronik selain tunduk pada UU No. 11 Tahun 2008 sebagai aturan hukum khusus (*lex specialis*), juga tunduk pada KUH Perdata sebagai aturan hukum umum (*lex generalis*)

Menurut Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008, Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008,

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti merupakan penambahan terhadap alat bukti yang telah ada dan dikenal sebelumnya dalam hukum.

Untuk permasalahan kontrak baku yang dibuat oleh salah satu pihak saja, tanpa melalui proses negosiasi dalam prakontrak, baik KUH Perdata maupun UU No. 11 Tahun 2008 tidak mengatur secara konkrit tentang prakontrak yang belum tercapai kesepakatan final antara para pihak yang akan membuat kontrak, termasuk kontrak elektronik. Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata misalnya, hanya mengatur kebebasan membuat kontrak pada saat (momen) terjadinya suatu kontrak. Begitu juga dengan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 hanya mengatur saat (momen) terjadinya dan kekuatan mengikat kontrak elektronik.

Untuk sahnyanya suatu kontrak Pasal 1338 KUH Perdata memuat ketentuan imperatif bahwa suatu kontrak bisa dikatakan sah jika telah memenuhi syarat-syarat antara lain: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk membuat kontrak 3) objek atau pokok persoalan tertentu; dan 4) sebab atau causa yang tidak dilarang.

Untuk menentukan bahwa syarat pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya telah terpenuhi dalam kontrak elektronik, dapat dilihat pada Pasal 5.2 tentang Kontrak Elektronik yang berbunyi

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini dibuat dalam bentuk kontrak elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik

merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian ini sehingga perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.<sup>121</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut berarti perjanjian tersebut terjadi ketika Mitra pengendara menggunakan aplikasi *GO-JEK Driver* saat pertama kali, jika Mitra pengendara tidak melakukan tindakan klik persetujuan maka Mitra pengendara tidak akan bisa menggunakan aplikasi *GO-JEK Driver* untuk mencari penumpang. Dalam hal ini para pihak telah menyepakati bagaimana cara masing-masing pihak menyatakan bentuk persetujuan.

Pada bagian akhir kontrak juga dipertegas kembali pada Pasal 5.7 tentang persetujuan Para Pihak yang berbunyi

Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh *GO-JEK*, AKAB dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka *GO-JEK*, AKAB dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.<sup>122</sup>

Selanjutnya, Pernyataan kedua, bagaimana mengetahui bahwa para pihak adalah cakap untuk membuat kontrak elektronik, dalam hal ini PT.*GO-JEK* Indonesia memberikan syarat umur minimal 17 Tahun dan mensyaratkan beberapa berkas berupa fotocopi KTP, SIM dan lain-lain.

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, Mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga harus diwakili atau dibantu oleh orang lain adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, orang perempuan dalam pernikahan.

<sup>121</sup> Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi *Go-Jek Driver*.

<sup>122</sup> Ibid.



Orang yang belum dewasa menurut Pasal 330 KUH Perdata yaitu orang yang belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jika ia telah kawin, maka ia dianggap telah dewasa. Akan tetapi sejak diterbitkannya UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa. Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa “Penghadap harus memenuhi syarat yaitu 1) paling sedikit berusia 18 tahun atau telah menikah, dan 2) cakap melakukan perbuatan hukum.” Maka setiap orang yang sudah berusia 18 Tahun atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Suatu hal tertentu tidak lain adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban dari pihak yang membuat kontrak. Dalam perjanjian kemitraan ini telah ditentukan bahwa Mitra pengendara mempunyai hak untuk menggunakan aplikasi *GO-JEK Driver* untuk mendapat penumpang. Kewajiban untuk mengikuti segala peraturan yang diberikan PT.*GO-JEK* Indonesia serta memberikan sejumlah komisi dari pendapatan yang didapat mitra dari Konsumen.

Mengenai pemutusan kontrak secara sepihak yang menyimpangi pasal 1266 KUH Perdata sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan Pasal 4 tentang Keberlakuan Perjanjian, menurut Agus Yudha Hernoko bahwa Pasal 1266 KUH Perdata merupakan aturan yang bersifat melengkapi. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi bahwa Pasal 1266 KUH Perdata terletak pada sistematika Buku III dengan karakteristiknya yang bersifat mengatur/melengkapi dan Para pihak dapat menentukan bahwa untuk pemutusan kontrak tidak diperlukan



Akan tetapi isi dari pasal 3.2 tersebut bertentangan dengan asas keseimbangan, dalam hal ini *Go-Jek* bebas untuk menutup ataupun tidak memberikan mitra akses kepada akun milik mitra secara sepihak tanpa perlu membuktikan kepada pihak manapun. Pasal tersebut berbunyi:

*GO-JEK* maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi *GO-JEK* apabila *GO-JEK* atau AKAB menganggap, dalam diskresi *GO-JEK* atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan *GO-JEK* ataupun AKAB.

Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa *GO-JEK* atau *AKAB* mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh *GO-JEK* atau *AKAB* untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra atas Persyaratan atau syarat ketentuan lain yang berlaku maupun pelanggaran yang dicurigai oleh *GO-JEK* maupun *AKAB* telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan penghimpunan fakta terhadap kegiatan Mitra melalui Aplikasi *GO-JEK*, pemberian surat peringatan, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi *GO-JEK* baik secara permanen maupun sementara, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).<sup>124</sup>

Akses terhadap akun *GO-JEK Driver* sangat penting bagi mitra Pengendara, hal tersebut merupakan unsur *Esensialia* dalam kontrak yang mutlak harus ada, yang tanpa itu kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan PT.*GO-JEK* Indonesia tidak mungkin ada karena Mitra pengendara melakukan perjanjian tersebut bertujuan untuk dapat mengakses aplikasi *Go-Jek Driver* untuk mencari penumpang melalui aplikasi tersebut.

<sup>124</sup> Perjanjian Kemitraan dalam aplikasi *GO-JEK Driver*.

**BAB V**

**PENUTUP**

### A. Keimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontrak elektronik dibuat secara sepihak oleh PT. *GO-JEK* Indonesia, tanpa ada keterlibatan mitra pengendara. PT. *GO-JEK* Indonesia bebas untuk menetapkan jumlah bagi hasil, serta melakukan tindakan *suspend*, dan pemutusan hubungan perjanjian. Sehingga pada praktiknya mitra pengendara bisa terkena pemutusan perjanjian walaupun mereka tidak melakukan pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan cara mendeteksi pelanggaran kode etik tersebut menggunakan sistem dan terdapat banyak celah yang ada di sistem tersebut yang berakibat merugikan para mitra.
2. Menurut hukum Islam perjanjian baku yang diterapkan PT. *GO-JEK* Indonesia dengan Mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip keseimbangan (*tawāzun*). Secara hukum Islam, perjanjian tersebut menjadi *fasad* (dapat dibatalkan).
3. Permasalahan kontrak baku yang dibuat tanpa melalui proses negosiasi dalam prakontrak, baik KUH Perdata maupun UU No. 11 Tahun 2008 tidak mengatur tentang prakontrak yang belum tercapai kesepakatan. Mengenai perubahan tarif dan perubahan peraturan serta pemutusan kontrak secara sepihak telah diatur dalam perjanjian tersebut dan para pihak telah memberikan persetujuan akan hal itu. Meskipun bertentangan dengan

beberapa pasal dalam KUH Perdata, hal tersebut diperbolehkan karena pasal tersebut bersifat mengatur/melengkapi yang berarti dapat dikesampingkan oleh para pihak.

## B. Saran

1. PT. *GO-JEK* Indonesia diharapkan untuk membuat kontrak elektronik yang sesuai dengan prinsip *Syariah* terutama prinsip keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Serta memberikan penjelasan kepada mitra pengendara terkait kode etik dan isi dari kontrak elektronik tersebut secara terperinci.
2. PT. *GO-JEK* Indonesia diharapkan untuk memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi serta Memberikan kesempatan kepada mitra untuk melakukan komplain apabila hak-haknya dalam perjanjian tersebut dapat dirugikan oleh pihak perusahaan, serta mendirikan lembaga yang khusus menangani permasalahan ini di luar perusahaan tersebut.
3. Untuk Mitra pengendara sebaiknya membaca dan memahami isi kontrak terlebih dahulu sebelum menyetujuinya. Jika isi dari kontrak tersebut tidak sesuai dengan kehendak hatinya sebaiknya kontrak tersebut tidak disetujui.
4. Mitra pengendara karena telah memberikan persetujuan terhadap kontrak elektronik tersebut sebaiknya mentaati seluruh peraturan yang diberikan PT *GO-JEK* Indonesia dengan penuh tanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, dan Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Sajstani. *Sunan Abu Dawud*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Agustina, Alifiyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan PT. GO-JEK Indonesia di Surabaya." *Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya*, 2017.
- Alwi, Hasan, et al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- AZ, Lukman Santoso. *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama, dan Bisnis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Zuhailī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Vol. Juz IV. Damsyik: Dār Al-Fikr, 1989.
- Badzrulzaman, Mariam Darus, et.al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Bahiyah, Horidatul. "Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan Gadget oleh Pekerja di perusahaan GO-JEK Surabaya." *Skripsi—Uin Sunan Ampel Surabaya*, 2016.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009.
- Daengnaja, Hasanuddin Rahman. *How to Design Sharia Contract*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Dewi, Gemala, et al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Jakarta, 2013.
- Fahrizal, *Wawancara*, Sidoarjo, 02 Desember 2017.









